

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agency

Menurut Fahmi (2014:19-20), agency theory (teori keagenan) merupakan suatu kondisi yang terjadi pada suatu perusahaan dimana pihak manajemen sebagai pelaksana yang disebut lebih jauh sebagai agen dan pemilik modal (owner) sebagai prinsipal membangun sebuah kontrak kerjasama yang disebut dengan “nexus of contract”, kontrak kerjasama ini berisi kesepakatan-kesepakatan yang menjelaskan bahwa pihak manajemen perusahaan harus bekerja secara maksimal untuk memberi kepuasan yang maksimal seperti profit yang tinggi kepada pemilik modal (owner). Implikasinya memungkinkan terjadinya sikap oportunistik (opportunistic behaviour) dikalangan manajemen perusahaan dalam melakukan beberapa tindakan yang sifatnya disengaja seperti:

- a) Melaporkan piutang tak tertagih (bad debt) yang lebih besar dari kenyataan yang sesungguhnya.
- b) Melaporkan hasil penjualan dengan peningkatan yang tidak terlalu tinggi.
- c) Melaporkan kepada pihak principal bahwa dibutuhkan dana tambahan untuk menunjang pelaksanaan proyek yang sedang dikerjakan jika tidak dibantu maka proyek akan terhenti.
- d) Melakukan income smooting, berupa melaporkan pendapatan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, namun sesuai dengan maksud dan keinginan agen (manajemen).

Pada umumnya manajer dan pemegang saham sering memiliki tujuan yang berbeda. Pengambilan keputusan oleh manajersering tidak berpihak kepada kepentingan pemegang saham, melainkan berpihak kepada kepentingan manajer itu sendiri. Perbedaan kepentingan tersebut akan menimbulkan konflik yang sering disebut konflik agensi (agency conflict). Pada perusahaan

besar konflik agensi sering terjadi dikarenakan kepemilikan saham oleh manajer memiliki persentase yang relatif kecil. Sehingga manajer sering membuat keputusan-keputusan yang tidak menguntungkan pemegang saham. Manajer tidak berani mengambil risiko yang besar yang tentu memiliki keuntungan yang besar pula dikarenakan takut kehilangan jabatan atau posisi yang strategis dalam perusahaan. Sehingga manajer cenderung mengambil risiko yang relatif kecil yang memiliki keuntungan yang kecil yang tidak dapat memuaskan keinginan dari pada pemegang saham. Selain itu, konflik juga mungkin disebabkan oleh banyaknya uang kas yang tersedia didalam perusahaan. Manajer sering menggunakan uang kas tersebut untuk membiayai proyek yang menguntungkan dirinya sendiri seperti perlengkapan kantor yang mewah, tiket untuk bepergian keluar negeri, dan lain sebagainya.

Perspektif teori *agency* merupakan dasar yang digunakan untuk memahami isu *corporate governance* dan *earning management*. Teori *agency* mengakibatkan hubungan yang asimetri antara pemilik dengan pengelola. Dengan hal ini terdapat dua kepentingan yang berbeda di dalam perusahaan dimana masing-masing pihak berusaha untuk mencapai kemakmuran yang dikehendaki. Menyadari adanya *agency problem*, *principal* melakukan dan mendesain sistem pengendalian internal, menyediakan informasi dan komunikasi yang baik atau membuat kontrak dengan sistem insentif yang semuanya bermanfaat untuk mengurangi hubungan yang asimetris (Oxtalianna dan Deasy, 2013).

2.1.2 Teori Legitimasi

Menurut Yusuf (2017) Menjelaskan Teori Legitimasi adalah teori yang menyatakan bahwa tanggung jawab sosial merupakan jawaban terhadap tekanan lingkungan sekitar yang berkaitan dengan sosial, kekuatan politik dan ekonomi. Menurut teori ini, perusahaan berusaha untuk mencari titik keseimbangan dalam menjalankan bisnis mereka dengan keinginan masyarakat sekitar. Pertanyaan yang dimunculkan adalah bagaimanakah perusahaan mereka dilihat oleh orang luar, dan apakah persepsi masyarakat terhadap

perusahaan sangat penting dan bisa memengaruhi keberadaan perusahaan dalam waktu yang relatif lama.

Presepsi masyarakat juga bisa mengancam keberadaan perusahaan dalam meraih keuntungan, Sekiranya masyarakat tidak puas terhadap perusahaan disebabkan oleh sikap perusahaan yang tidak sah menurut undang-undang maka masyarakat berhak untuk melakukan protes atau melayangkan somasi terhadap perusahaan tersebut. Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan adalah salah satu mekanisme atau sistem yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara perusahaan dengan stakeholder. Dalam penelitian ini Teori legitimasi mengimplikasikan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan bertujuan untuk memperoleh pengakuan legitimasi dari masyarakat.

Teori legitimasi berguna dalam menganalisis perilaku suatu organisasi, karena teori legitimasi adalah hal yang paling penting bagi organisasi. Batasan yang ditekankan oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial mendorong pentingnya analisis perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan (Wikipedia, 2017). Teori legitimasi dilandasi oleh kontrak sosial yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat dimana perusahaan beroperasi dengan menggunakan sumber ekonomi. Adanya teori legitimasi memberikan landasan bahwa perusahaan harus menaati norma-norma yang berlaku di masyarakat dimana perusahaan berada agar operasi perusahaan juga dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya konflik dari masyarakat.

2.1.3 Pengertian Pengendalian Internal

Menurut Romney & Steinbart (2015:216) pengendalian internal (internal control) adalah sebagai berikut:

“Pengendalian internal adalah sebuah proses yang diimplementasikan untuk memberikan jaminan yang memenuhi beberapa objektif dari pengendalian internal, diantaranya yaitu menjaga aset, menjaga catatan dalam detail yang cukup untuk pelaporan aset perusahaan yang tepat dan akurat,

menyediakan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, menyiapkan laporan keuangan dengan kriteria yang ditentukan, mendorong dan meningkatkan efisiensi operasional, mendorong ketaatan dalam hal manajerial, dan memenuhi persyaratan dari regulasi dan peraturan yang ada.”

Sedangkan pengendalian internal menurut *The Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission* (COSO) dalam *Executive Summary* (2013:3) mendefinisikan sebagai berikut: "*Internal control is a process, effected by an entity's board of directors, management, and other personnel, designed to providereasonable assurance regarding the achievement of objectives relating tooperations, reporting, and compliance.*"

Berdasarkan rumusan COSO tersebut, bahwa definisi pengendalian internal adalah suatu proses, dipengaruhi oleh dewan entitas dari direksi, manajemen, dan personil lainnya yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan yang berkaitan dengan operasi, pelaporan, dan kepatuhan.

Adapun menurut Hery (2013:159) pengertian pengendalian internal adalah sebagai berikut:

“Pengendalian internal adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum atau undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan.”

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal adalah suatu cara yang berisi seperangkat kebijakan dan peraturan untuk mengarahkan, mengawasi, dan melindungi sumber daya perusahaan agar terhindar dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan dan penyelewengan. Dengan kata lain pengendalian

internal dilakukan untuk memantau apakah kegiatan operasional telah berjalan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang ditetapkan perusahaan.

2.1.4 Tujuan Pengendalian Internal

Tujuan pengendalian internal menurut COSO sebagai berikut

1. Keefektifan dan efisiensi dari operasi
Dengan menggunakan sistem pengendalian intern maka kegiatan operasi perusahaan dapat diharapkan lebih efektif dan efisien.
2. Keandalan pelaporan keuangan
Jika sistem informasi internal perusahaan bagus maka dapat dipastikan laporan keuangan juga bagus.
3. Ketaatan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku
Sistem pengendalian internal dibuat agar para pekerja dalam perusahaan menaati peraturan dan hukum yang berlaku.
4. Menjaga kekayaan suatu organisasi
Sistem pengendalian internal diharapkan kekayaan perusahaan dapat dijaga dari segala kemungkinan/risiko yang terjadi misalnya penyalahgunaan kas dapat dikontrol melalui sistem pengendalian internal yang telah dibuat oleh perusahaan.

2.1.5 Unsur-Unsur Pengendalian Intern

Menurut COSO framework, internal control terdiri dari 5 komponen yang saling terkait, yaitu:

1. *Control Environment*
2. *RiskAssessment*
3. *Control Activities*
4. *Information And Communication*
5. *Monitoring Activities*

Agar lebih jelas berikut ini akan dijelaskan kelima komponen pengendalian internal tersebut :

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Lingkungan pengendalian menciptakan suasana pengendalian dalam suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran personal organisasi tentang pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan landasan untuk semua komponen pengendalian internal yang membentuk disiplin dan struktur.

Berdasarkan rumusan COSO, bahwa lingkungan pengendalian didefinisikan sebagai seperangkat standar, proses, dan struktur yang memberikan dasar untuk melaksanakan pengendalian internal di seluruh organisasi.

Selanjutnya, COSO menyatakan, bahwa terdapat lima prinsip yang harus ditegakkan atau dijalankan dalam organisasi untuk mendukung lingkungan pengendalian agar dapat terwujud dengan baik, yaitu:

Organisasi yang terdiri dari dewan direksi, manajemen, dan personil lainnya menunjukkan komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika.

1. Dewan direksi menunjukkan independensi dari manajemen dan dalam mengawasi pengembangan dan kinerja pengendalian internal.
2. Manajemen dengan pengawasan dewan direksi menetapkan struktur, jalur pelaporan, wewenang-wewenang dan tanggung jawab dalam mengejar tujuan.
3. Organisasi menunjukkan komitmen untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan individu yang kompetensi sejalan dengan tujuan.
4. Organisasi meyakinkan individu bertanggung jawab atas tugas dan tanggung jawab pengendalian internal mereka dalam mengejar tujuan.

2. Penilaian Risiko (*RiskAssessment*)

Menurut COSO, penilaian risiko melibatkan proses yang dinamis dan interaktif untuk mengidentifikasi dan menilai risiko terhadap pencapaian tujuan. Risiko itu sendiri dipahami sebagai suatu kemungkinan bahwa suatu peristiwa akan terjadi dan mempengaruhi pencapaian tujuan entitas, dan risiko terhadap

pencapaian seluruh tujuan dari entitas ini dianggap relatif terhadap toleransi risiko yang ditetapkan. Oleh karena itu, penilaian risiko membentuk dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola oleh organisasi.

Prinsip-prinsip yang mendukung penilaian risiko menurut COSO sebagai berikut:

1. Organisasi menetapkan tujuan dengan kejelasan yang cukup untuk memungkinkan identifikasi dan penilaian risiko yang berkaitan dengan tujuan.
2. Organisasi mengidentifikasi risiko terhadap pencapaian tujuan di seluruh entitas dan analisis risiko sebagai dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola.
3. Organisasi mempertimbangkan potensi kecurangan dalam menilai risiko terhadap pencapaian tujuan.
4. Organisasi mengidentifikasi dan menilai perubahan yang signifikan dapat mempengaruhi sistem pengendalian internal.

3. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)

Menurut COSO, aktivitas pengendalian adalah tindakan-tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen untuk mengurangi risiko terhadap pencapaian tujuan dilakukan. Aktivitas pengendalian dilakukan pada semua tingkat entitas, pada berbagai tahap dalam proses bisnis, dan atas lingkungan teknologi.

Aktivitas pengendalian memiliki berbagai macam tujuan dan diterapkan dalam berbagai tindakan dan fungsi organisasi. Aktivitas pengendalian meliputi kegiatan yang berbeda, seperti: otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, analisis, prestasi kerja, menjaga keamanan harta perusahaan dan pemisahan fungsi.

COSO menegaskan mengenai prinsip-prinsip dalam organisasi yang mendukung aktivitas pengendalian yaitu sebagai berikut:

1. Organisasi memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian yang berkontribusi terhadap mitigasi risiko pencapaian sasaran pada tahap yang dapat diterima.
2. Organisasi memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian umum atas teknologi untuk mendukung tercapainya tujuan.
3. Organisasi menyebarkan aktivitas pengendalian melalui kebijakan kebijakan yang menetapkan apa yang diharapkan, dan prosedur-prosedur yang menempatkan kebijakan kebijakan ke dalam tindakan.

4. Informasi dan Komunikasi (*Information And Communication*)

COSO menjelaskan bahwa informasi sangat penting bagi setiap entitas untuk melaksanakan tanggung jawab pengendalian internal guna mendukung pencapaian tujuan-tujuannya. Informasi yang diperlukan manajemen adalah informasi yang relevan dan berkualitas baik yang berasal dari sumber internal maupun eksternal dan informasi yang digunakan untuk mendukung fungsi komponen-komponen lain pengendalian internal. Informasi diperoleh ataupun dihasilkan melalui proses komunikasi antar pihak internal maupun eksternal yang dilakukan secara terus- menerus, berulang, dan berbagi. Kebanyakan organisasi membangun suatu sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan informasi yang andal, relevan, dan tepat waktu.

Ada 3 prinsip yang mendukung komponen informasi dan komunikasi dalam pengendalian internal menurut COSO,yaitu:

1. Organisasi memperoleh atau menghasilkan dan menggunakan informasi yang berkualitas dan yang relevan untuk mendukung fungsi pengendalian internal.
2. Organisasi secara internal mengkomunikasikan informasi, termasuk tujuan dan tanggung jawab untuk pengendalian internal dalam rangka mendukung fungsi pengendalian internal.
3. Organisasi berkomunikasi dengan pihak internal mengenai hal-hal yang mempengaruhi fungsi pengendalian internal.

5. Aktivitas Pemantauan (*Monitoring Activities*)

Aktivitas pemantauan menurut COSO merupakan kegiatan evaluasi dengan beberapa bentuk apakah yang sifatnya berkelanjutan, terpisah maupun kombinasi keduanya yang digunakan untuk memastikan apakah masing-masing dari kelima komponen pengendalian internal mempengaruhi fungsi fungsi dalam setiap komponen, ada dan berfungsi. Evaluasi berkesinambungan, (terus-menerus) dibangun ke dalam proses bisnis pada tingkat yang berbeda dari entitas menyajikan informasi yang tepat waktu. Evaluasi terpisah dilakukan secara periodik, akan bervariasi dalam lingkup dan frekuensi tergantung pada penilaian risiko, efektifitas evaluasi yang sedang berlangsung, bahan pertimbangan manajemen lainnya. Temuan-temuan dievaluasi terhadap kriteria yang ditetapkan oleh pembuat kebijakan, lembaga-lembaga pembuat standar yang diakui atau manajemen dan dewan direksi, dan kekurangan kekurangan yang ditemukan dikomunikasikan kepada manajemen dan dewan direksi.

Kegiatan pemantauan meliputi proses penilaian kualitas kinerja pengendalian internal sepanjang waktu, dan memastikan apakah semuanya dijalankan seperti yang diinginkan serta apakah telah disesuaikan dengan perubahan keadaan. Pemantauan seharusnya dilakukan oleh personal yang semestinya melakukan pekerjaan tersebut, baik pada tahap desain maupun pengoperasian pengendalian pada waktu yang tepat, guna menentukan apakah pengendalian internal beroperasi sebagaimana yang diharapkan dan untuk menentukan apakah pengendalian internal tersebut telah disesuaikan dengan perubahan keadaan yang selalu dinamis.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa pemantauan dilakukan untuk memberikan keyakinan apakah pengendalian internal telah dilakukan secara memadai atau tidak. Dari hasil pemantauan tersebut dapat ditemukan kelemahan dan kekurangan pengendalian sehingga dapat diusulkan pengendalian yang lebih baik.

2.1.6 Keterbatasan Pengendalian Intern

Pelaksanaan struktur pengendalian internal yang efisien dan efektif haruslah mencerminkan keadaan yang ideal. Namun dalam kenyataannya hal ini sulit untuk dicapai, karena dalam pelaksanaannya struktur pengendalian internal mempunyai keterbatasan-keterbatasan. COSO menjelaskan bahwa pengendalian internal tidak bisa mencegah penilaian buruk atau keputusan, atau kejadian eksternal yang dapat menyebabkan sebuah organisasi gagal untuk mencapai tujuan operasionalnya. Dengan kata lain bahwa sistem pengendalian internal yang efektif dapat mengalami kegagalan.

Lebih lanjut dikemukakan bahwa keterbatasan-keterbatasan yang ada mungkin terjadi sebagai hasil dari penetapan tujuan-tujuan yang menjadi prasyarat untuk pengendalian internal tidak tepat, penilaian manusia dalam pengendalian keputusan yang dapat salah dan bias, faktor kegagalan/kesalahan manusia sebagai pelaksana, kemampuan manajemen untuk mengesampingkan pengendalian internal, kemampuan manajemen, personel lainnya, ataupun pihak ketiga untuk menghindari kolusi, dan juga peristiwa-peristiwa eksternal yang berada di luar kendali organisasi.

2.2 Piutang Usaha

2.2.1 Pengertian Piutang Usaha

Terjadinya transaksi penjualan kredit berarti ada tenggang waktu yang menimbulkan suatu piutang usaha bagi perusahaan, dimana pembayarannya akan dilakukan dalam suatu jangka waktu yang telah disepakati bersama antara pembeli dan penjual.

Menurut Harnanto (2010) piutang adalah klaim terhadap pihak lain untuk membayar sejumlah uang atau jasa dalam waktu paling lama satu tahun.

Pengertian tersebut diatas lebih sempit jika dibanding dengan pengertian piutang dalam bahasa sehari-hari. Dalam bahasa sehari-hari pengertian piutang meliputi sejumlah kas, barang atau jasa dimana yang akan datang sebagai akibat kejadian pada masa lalu. Piutang dapat dikelompokkan sebagai piutang dagang dan piutang

non dagang. Piutang dagang merupakan piutang yang timbul dalam operasi normal suatu kegiatan bisnis pada saat terjadinya penjualan barang dagangan secara kredit adapun Piutang non dagang muncul dari transaksi selain penjualan barang atau jasa.

2.2.2 Pengklasifikasi Piutang

Pengklasifikasian piutang dilakukan untuk memudahkan pencatatan transaksi yang mempengaruhinya. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2011) mengemukakan bahwa menurut sumber terjadinya, piutang digolongkan ke dalam dua (2) kategori yaitu: piutang usaha dan piutang lain-lain. Piutang usaha timbul karena penjualan produk atau jasa dalam rangka kegiatan normal usaha, sementara piutang yang timbul di luar kegiatan normal usaha digolongkan sebagai piutang lain-lain. Berikut adalah pengelompokan piutang secara umum.

1. Piutang Dagang (*Trade Receivable*)

Piutang dagang merupakan jumlah tagihan perusahaan kepada pelanggan yang berasal dari penjualan barang dan jasa yang merupakan kegiatan usaha normal perusahaan. Piutang dagang merupakan tipe piutang yang paling lazim ditemukan dan umumnya mempunyai jumlah yang paling besar. Piutang ini dapat dibagi menjadi piutang usaha dan wesel tagih.

- a) Piutang Usaha (*account receivable*) Piutang usaha yang berasal dari penjualan kredit jangka pendek dan biasanya dapat ditagih dalam waktu 30 sampai 60 hari. Biasanya piutang usaha tidak melibatkan bunga, meskipun pembayaran bunga atau biaya jasa dapat saja ditambahkan bilamana pembayarannya tidak dilakukan dalam periode tertentu.
- b) Wesel Tagih (*notes receivable*) Wesel tagih adalah janji tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu di masa depan. Wesel tagih dapat berasal dari penjualan, pembayaran atau transaksi lainnya. Wesel tagih bisa bersifat jangka pendek ataupun jangka panjang. Wesel tagih dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu :

- 1) Wesel tagih berbunga (*interest bearing notes*)

Wesel tagih berbunga ditulis sebagai perjanjian untuk membayar pokok atau jumlah nominal dan ditambah dengan bunga yang terutang pada tingkat khusus.

2) Wesel tagih tanpa bunga (*non-interest bearing notes*)

Padawesel tagih tanpa bunga tidak dicantumkan persen bunga, tetapi jumlah nominalnya meliputi beban bunga.

2. Piutang Lain-Lain (Non Dagang)

Piutang lain-lain merupakan tagihan perusahaan kepada pelanggan atau pihak lain akibat dari transaksi yang secara tidak langsung berhubungan dengan kegiatan normal usaha perusahaan. Piutang lain-lain meliputi piutang pegawai, piutang dari perusahaan afiliasi, piutang dividen, piutang bunga, dan lain-lain.

2.2.3 Umur Piutang

Umur piutang adalah jangka waktu sejak dicatatnya transaksi penjualan sampai dengan saat dibuatnya daftar piutang (Soemarso, 2009). Karakteristik umur piutang dapat diklasifikasikan menjadi belum jatuh tempo, telah jatuh tempo 31-60 hari, telah jatuh tempo 61-90 hari, telah jatuh tempo 91-180 hari, telah jatuh tempo 181-365 hari, dan telah jatuh tempo diatas 365 hari. Dengan metode umur piutang, estimasi secara terpisah atas persentase piutang tak tertagih yang berbeda akan diterapkan atas kelompok umur yang berbeda.

2.2.4 Risiko Kerugian Piutang

Setiap tindakan yang diambil pasti mengandung risiko, baik itu risiko kecil maupun besar. Tentunya risiko tersebut mempengaruhi keberlangsungan dalam pencapaian tujuan perusahaan, Risiko yang timbul dapat bermacam-macam dan dapat dapat menimbulkan dampak negatif bagi perusahaan. Risiko ini merupakan risiko kerugian piutang.

Risiko piutang menurut Agustina (2009) disebabkan tidak tertagihnya piutang sehingga menimbulkan *credit cost* (biaya kredit). Biaya kredit tersebut meliputi:

- a. Kerugian akibat *outstanding* piutang
- b. Biaya proses penagihan lebih tinggi dari jumlah piutang
- c. Keterlambatan pembayaran piutang, sehingga mengakibatkan rata-rata jangka waktu penagihan menjadi lebih panjang.

2.2.5 Piutang Tak Tertagih

Hampir setiap perusahaan mengalami piutang tak tertagih yang merupakan risiko dari memiliki piutang. Menurut Wahyuni (2012), Piutang tak tertagih adalah hak untuk menagih sejumlah uang dari penjual kepada pembeli karena adanya transaksi penjualan secara kredit yang belum atau tidak bisa dibayarkan tepat pada waktunya.

2.2.6 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Piutang Tak Tertagih

Menurut Rivai, dkk (2013) kredit macet atau piutang tak tertagih dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

1. Faktor internal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari pihak kreditur. Faktor-faktor tersebut diantaranya :
 - a. Keteledoran dari pihak kreditur mematuhi persetujuan pemberian piutang yang telah ditegaskan.
 - b. Terlalu mudah memberikan piutang yang disebabkan karena tidak ada patokan yang jelas tentang standar kekayaan.
 - c. Konsentrasi piutang pada sekelompok pengguna jasa atau sektor usaha yang berisiko tinggi.
 - d. Kurang memadainya jumlah eksekutif dan staf bagian piutang.
 - e. Lemahnya bimbingan dan pengawasan dan pimpinan kepala eksekutif dan staf bagian piutang.

- f. Lemahnya perusahaan mendeteksi timbulnya outstanding piutang termasuk mendeteksi arah perkembangan arus kas pengguna jasa atau debitur lama.
2. Faktor eksternal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari pihak debitur. Faktor-faktor tersebut diantaranya :
- a. Menurunnya kondisi ekonomi perusahaan yang disebabkan merosotnya kondisi ekonomi umum dan atau bidang usaha dimana mereka beroperasi.
 - b. Adanya salah arus dalam pengelolaan usaha bisnis perusahaan atau karena kurang pengalaman dalam bidang usaha yang ditangani.
 - c. Masalah keluarga, misalnya perceraian, kematian, sakit berkepanjangan, pemborosan dana oleh salah satu atau beberapa anggota keluarga debitur.
 - d. Kegagalan debitur pada bidang usaha atau perusahaan mereka yang lain.
 - e. Munculnya kejadian diluar kekuasaan debitur, misalnya perang dan bencana alam.
 - f. Watak buruk debitur (yang semula memang merencanakan tidak akan melunasi piutangnya).

2.2.7 Analisis Piutang Tak Tertagih

Analisis piutang, seperti yang diungkapkan oleh Dwi Martani dkk (2014), dilakukan dengan melihat perputaran piutang dan umur piutang. Perputaran piutang dihitung dari penjualan dalam satu periode dibagi piutang rata-rata dalam satu tahun. Piutang rata-rata dihitung dari piutang awal ditambah piutang akhir periode dibagi dua. Entitas dengan perputaran piutang tinggi menandakan bahwa entitas tersebut bagus.

$$\text{Perputaran piutang} = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Piutang Rata - rata}}$$

$$\text{Umur piutang} = \frac{365}{\text{Perputaran piutang}}$$

Umur piutang dihitung dengan hari dalam satu tahun dibagi dengan perputaran piutang. Semakin lama umur piutang mengindikasikan perputarannya rendah, sehingga modal kerja perusahaan banyak berhenti di investasi piutang. Rata-rata umur piutang ini akan dibandingkan dengan kebijakan kredit perusahaan.

Perhitungan kerugian piutang atas dasar piutang akhir periode dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu :

1. Menaikkan Cadangan Kerugian Piutang

Persentase kerugian :

Persentase kerugian yang ditetapkan x saldo piutang

Saldo rekening cadangan kerugian piutang :

Persentase kerugian +/- saldo rekening cadangan kerugian piutang

2. Menambah Cadangan Kerugian Piutang

Cara untuk menghitung kerugian piutang hampir sama dengan cara pertama, namun tidak memperhatikan saldo rekening cadangan kerugian piutang :

Persentase kerugian piutang x saldo piutang

3. Menaikkan Cadangan Melalui Analisa Umur Piutang

Cara ini dilakukan dengan membuat klasifikasi umur piutang dari pelanggan, langkah berikutnya adalah menentukan persentase kerugian piutang untuk masing-masing klasifikasi umur piutang. Sehingga akan diketahui jumlah taksiran kerugian piutang. Jumlah kerugian piutang pada periode bersangkutan adalah hasil dari jumlah taksiran kerugian

piutang dikurangi atau ditambah dengan saldo rekening kerugian piutang. Bila digambarkan secara sederhana adalah sebagai berikut :
Jumlah taksiran kerugian piutang $-/+$ saldo rekening cadangan kerugian piutang.

2.2.8 Metode Penyisihan Piutang

Menurut Wahyuni (2012) piutang tak tertagih adalah hak untuk menagih sejumlah uang dari penjual kepada pembeli karena adanya transaksi penjualan secara kredit yang belum atau tidak bisa dibayarkan tepat pada waktunya. Metode penyisihan piutang tak tertagih terdiri dari 2 metode, yaitu metode hapus langsung dan metode cadangan.

1) Metode Hapus Langsung (*direct write-off method*)

Menurut Herry (2008) Faktor-faktor yang membuat metode hapus langsung digunakan :

- a) Terdapatnya sebuah situasi dimana tidak memungkinkan bagi perusahaan untuk mengestimasi besarnya piutang usaha yang tidak dapat ditagih sampai dengan akhir periode.
- b) Jumlah piutang usaha yang ditimbulkan dari kegiatan bisnis perusahaan dapat dipastikan sangat kecil.

2) Metode Pencadangan

Secara teoritis, jika besarnya estimasi atas piutang tak tertagih adalah akurat, maka akun cadangan seharusnya selalu mendekati nol. Akan tetapi estimasi tidak pernah nol karena perusahaan akan terus melakukan penjualan kredit dan membuat estimasi yang baru.

2.2.9 Pengendalian Intern atas Piutang Usaha

Pengendalian intern merupakan kegiatan yang sangat penting dalam pencapaian tujuan perusahaan. Demikian pula dunia usaha mempunyai perhatian yang makin meningkat terhadap pengendalian intern. Sawyers mendefinisikan

pengendalian intern sebagai “suatu proses yang dipengaruhi oleh aktivitas dewan komisari, manajemen atau pegawai lainnya yang didesain untuk memberikan keyakinan yang wajar tentang pencapaian 3 golongan tujuan berikut ini: a) Keandalan pelaporan keuangan, b) Efektivitas dan efisiensi operasi, c) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.”

Sedangkan menurut Sanyoto pengendalian intern ini dapat dibedakan menjadi beberapa bagian (2007) :

- a) *Preventif Controls*, yaitu pengendalian intern yang dirancang dengan maksud untuk mengurangi kemungkinan terjadi kesalahan dan penyalahgunaan. Contoh jenis pengendalian ini ialah design formulir yang baik, item nya lengkap, mudah diisi, serta *user training* atau pelatihan kepada orang-orang yang berkaitan dengan input sistem, sehingga mereka tidak melakukan kesalahan.
- b) *Detection Control*, adalah pengendalian yang di desain dengan tujuan agar apabila data direkam atau di konversi dari media sumber untuk ditransfer ke sistem komputer dideteksi bila terjadi kesalahan (maksud nya tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan). Contoh jenis pengendalian ini adalah misalnya seseorang mengambil uang di ATM, maka seharusnya program komputer mendeteksi jika dana tidak cukup, atau saldo minimum tidak mencukupi, atau melebihi jumlah maksimal yang diijinkan untuk pengambilan tiap harinya.
- c) *Corrective Control*, ialah pengendalian yang sifatnya jika terdapat data yang sebenarnya *error* yang terdeteksi oleh program validasi, harus ada prosedur yang jelas tentang bagaimana melakukan pembetulan terhadap data yang salah dengan maksud untuk mengurangi kemungkinan kerugian kalau kesalahan / penyalahgunaan tersebut sudah benar-benar terjadi.

2.2.10 SAK ETAP

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) merupakan standar akuntansi keuangan yang berdiri sendiri dan tidak mengacu pada SAK Umum. SAK ETAP relatif tidak berubah selama beberapa tahun serta memiliki bentuk pengaturan yang lebih sederhana dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan (DSAK IAI, 2013). SAK ETAP atau *The Indonesian Accounting Standards for Non-Publicly-Accountable Entities* telah disahkan DSAK IAI pada 19 Mei 2009. Terdapat dua kriteria yang menentukan suatu entitas tergolong entitas tanpa akuntabilitas publik (ETAP), yaitu.

1. Tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan.

Suatu entitas dikatakan memiliki akuntabilitas publik yang signifikan jika:

- a. Entitas telah mengajukan pendaftaran atau entitas dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran pada otoritas pasar modal (BAPEPAM-LK) atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal. Oleh karena itu, Bapepam mengeluarkan surat edaran Bapepam-LK No. SE-06/BL/2010 tentang larangan penggunaan SAK ETAP bagi lembaga pasar modal, termasuk emiten, perusahaan publik, manajer investasi, sekuritas, asuransi, reksa dana, dan kontrak investasi kolektif.
- b. Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat seperti bank, entitas asuransi, Pialang dan/atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana, dan bank investasi.

2. Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purposes financial statements*) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah (a) pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha; (b) kreditur; dan (c) lembaga pemeringkat kredit.

Sementara itu, laporan keuangan menurut IAI dalam SAK ETAP meliputi lima komponen berikut.

1. Neraca.
2. Laporan laba rugi.
3. Laporan perubahan ekuitas.
4. Laporan arus kas.
5. Catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan sumber estimasi ketidakpastian.

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Dalam memenuhi tujuannya laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*) atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Karakteristik kualitatif informasi dalam laporan keuangan menurut SAK ETAP meliputi beberapa hal berikut.

a. Dapat Dipahami

Kualitas penting informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dipahami segera dapat dipahami oleh pengguna. Untuk maksud ini, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta ketekunan yang wajar.

b. Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan dengan kebutuhan pengguna untuk proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan cara membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

c. Materialitas

Informasi dipandang material jika kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan situasi tertentu dari kelalaian dalam mencantumkan (*omission*) atau kesalahan dalam mencatat (*misstatement*).

d. Keandalan

Agar bermanfaat, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus andal. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari kesalahan material dan bias, dan penyajian secara jujur apa yang seharusnya disajikan atau

yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Laporan keuangan tidak bebas dari bias (melalui pemilihan atau penyajian informasi) jika dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan suatu keputusan atau kebijakan untuk tujuan mencapai suatu hasil tertentu.

e. Substansi Mengungguli Bentuk

Transaksi, peristiwa dan kondisi lain dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. Hal ini untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan.

f. Pertimbangan Sehat

Ketidakpastian yang tidak dapat diabaikan meliputi berbagai peristiwa dan keadaan yang dipahami berdasarkan pengungkapan sifat dan penjelasan peristiwa dan keadaan tersebut melalui penggunaan pertimbangan sehat dalam menyusun laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan pertimbangan yang diperlukan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga asset atau penghasilan tidak disajikan lebih tinggi dan kewajiban atau beban tidak disajikan lebih rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan pembentukan asset atau penghasilan yang lebih rendah dan pencatatan kewajiban atau beban yang lebih tinggi. Singkatnya, pertimbangan sehat tidak mengizinkan bias.

g. Kelengkapan

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan kurang mencukupi ditinjau dari segi relevansi.

h. Dapat Dibandingkan

Pengguna harus dapat membandingkan laporan entitas antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar entitas untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk suatu entitas, antar periode untuk entitas tersebut dan untuk entitas yang berbeda.

i. Tepat Waktu

Agar relevan, informasi dalam laporan keuangan harus dapat mempengaruhi keputusan ekonomi para penggunanya. Tepat waktu meliputi penyediaan informasi laporan keuangan dalam jangka waktu pengambilan keputusan. Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya.

j. Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat

Manfaat informasi seharusnya melebihi biaya penyediaannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya tersebut juga tidak perlu ditanggung oleh pengguna yang menikmati manfaat. Dalam evaluasi manfaat dan biaya, entitas harus memahami bahwa manfaat informasi mungkin juga manfaat yang dinikmati pengguna eksternal.

2.3 Penelitian Terdahulu

Abdul Latif dan Yuningsih Van Solang (2016) melakukan penelitian dengan judul Analisis Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pengelolaan Piutang Pada Amanah Finance Cabang Gorontalo. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sistem pengendalian intern yang meliputi Kualitas karyawan sesuai dengan tanggung jawabnya. Pemisahan tanggung jawab secara benar dan secara berkala dibandingkan dengan piutang Amanah Finance Manajemen di cabang Gorontalo. Jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif tipe penelitian studi ini menemukan bahwa internal pelaksanaan pengendalian internal Proses sudah berjalan dengan kurang baik, karena manajemen telah melakukan Pemisahan tanggung jawab masing-masing karyawan berdasarkan kompetensi masing-masing karyawan dan telah melakukan searah penuh pendelegasian wewenang. Setiap transaksi rekaman yang disahkan oleh fungsi piutang dari penerimaan dan pengeluaran kas. Lalu, di akhir masing-masing periode selalu membuat jurnal penyesuaian, dan laporan keuangan yang disusun secara finansial pada Secara reguler. Manajemen Keuangan melakukan evaluasi secara periodik berdasarkan aspek keuangan pernyataan disiapkan setiap periode.

Albertus dan Dewi (2012) melakukan penelitian dengan judul Analisis Pengendalian Internal Piutang pada Perusahaan Jasa PT Akita Jaya Mobilindo. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini antara lain pengendalian internal sebagai variabel independen dan piutang sebagai variabel dependen. Jenis data

yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa questionnaire. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat apakah pengendalian internal piutang pada PT Akita Jaya Mobilindo sudah diterapkan dengan baik sehingga piutang sudah dikelola dengan efektif dan efisien. Adapun langkah-langkah dalam menganalisis pengendalian internal PT. Akita Jaya Mobilindo yakni sebagai berikut (1) Pemberian kredit, (2) Penagihan piutang, (3) Pengendalian yang layak. Dan pada hasil penelitian ini prosedur penjualan pada perusahaan PT. Akita Jaya Mobilindo sudah sangat baik dan sesuai dengan standar penjualan kredit umumnya, dimana pembagian setiap fungsi sudah ada. Dokumen yang digunakan dalam penjualan sebagai transaksi sudah sesuai dengan standar yang baik yaitu, mempunyai tembusan untuk setiap fungsi yang ada, dan di otorisasi oleh pejabat yang berwenang berdasarkan perhitungan rasio (RTO), perputaran piutang perusahaan PT. Akita Jaya Mobilindo dari tahun ke mengalami ketidakstabilan (naik-turun). Semakin cepat syarat pembayaran semakin baik bagi perusahaan, karena semakin cepat modal kerja yang tertanam dalam bentuk piutang kembali menjadi modal atau kas, yang berarti semakin tinggi tingkat perputaran piutang berdasarkan perhitungan periode pengumpulan piutang (ACP) Rasio ini menunjukkan bahwa periode pengumpulan piutang PT. Akita Jaya Mobilindo setiap tahunnya cukup baik. Semakin kecil periode pengumpulan piutang semakin baik bagi perusahaan, karena modal yang terikat dalam piutang dapat kembali dengan cepat menjadi kas.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Hamel (2013) yang meneliti tentang Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Terhadap Piutang pada PT. Nusantara Surya Sakti. Penelitian tersebut dilakukan untuk menganalisa Efektivitas Sistem Pengendalian Intern terhadap Piutang Usaha pada PT. Nusantara Surya Sakti, dimana perusahaan ini menyediakan pembiayaan kendaraan roda dua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pengendalian terhadap piutang usaha pada PT. Nusantara Surya Sakti cukup efektif, namun masih perlu adanya pemisahan tugas antara bagian pembukuan dan penerimaan kas dan fungsi pengendalian intern harus ditingkatkan.

Penelitian lain nya dilakukan oleh Habibie (2013), yang meneliti tentang piutang dengan judul Analisis Pengendalian Intern Piutang Usaha pada PT. Adira Finance cabang Manado. Penelitian tersebut menggunakan uji kualitatif terhadap pengendalian intern piutang usaha yang mengacu pada kerangka kerja COSO pada unsur-unsur pengendalian intern. Sample diambil 5 orang. Hasil pengujian menunjukkan bahwa secara keseluruhan pengendalian intern piutang usaha efektif, dimana manajemen perusahaan sudah menerapkan konsep dan prinsip-prinsip pengendalian intern.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Juni Lafiah dan Abriandi (2014), yang meneliti tentang Analisis Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Atas Piutang Usaha dan Pengaruhnya Terhadap Kolektibilitas Piutang Usaha. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis efektivitas dari sistem pengendalian internal penjualan kredit dan pengaruhnya terhadap kolektibilitas piutang usaha. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi langsung, dokumentasi, dan penyebaran kuesioner yang dilakukan kepada 21 orang karyawan perusahaan PT XYZ. Metode penelitian kombinasi kualitatif dan kuantitatif digunakan untuk menganalisa dan menarik kesimpulan dari penelitian ini. Hasil dari analisis menunjukkan bahwa efektivitas sistem pengendalian internal PT XYZ terhadap penjualan kredit adalah sebesar 70%, hasil ini berarti cukup baik namun perlu ada peningkatan dan dilengkapi dengan alat pengendalian tambahan seperti perangkat lunak dengan sistem IT yang terintegrasi. Kesimpulan dari skripsi ini adalah efektivitas penerapan sistem pengendalian internal penjualan kredit terutama komponen penilaian risiko piutang dan komponen pengawasan perlu ditingkatkan dan lebih diperhatikan. Hubungan efektivitas pengendalian internal terhadap kolektibilitas adalah signifikan, dan efektivitas tersebut juga memberi pengaruh pada kolektibilitas piutang.

Adapun penelitian lain menurut Kriswanto (2011) yang meneliti tentang Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Atas Penjualan Kredit, Piutang dan Penerimaan Kas Pada PT Equipindo Perkasa : Studi Kasus Pada Cabang Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah eksploratoria, metode penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Dalam

memperoleh data sekunder baik teoritis maupun dokumentasi perusahaan dengan cara mengumpulkan, membaca dan mempelajari data-data serta informasi yang bersifat teoritis, sedangkan dalam penelitian lapangan penulis meninjau perusahaan secara langsung sebagai objek penelitian antara lain dengan melakukan observasi, wawancara dan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal dalam fungsi penjualan masih belum dijalankan secara memadai. Melihat permasalahan-permasalahan yang ada, dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal atas penjualan kredit masih belum berjalan secara efektif dan efisien.

Terdapat penelitian lain yang dilakukan oleh Surupati (2013) yang meneliti tentang Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Atas Penjualan dan Penagihan Piutang Pada PT. Laris Manis Utama cabang Manado. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mengevaluasi penerapan sistem pengendalian intern atas penjualan dan piutang pada PT. Laris Manis Utama. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah metode wawancara dan dokumentasi. Metode analisis dilakukan adalah analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pengendalian intern penjualan yang meliputi struktur organisasi, sistem otorisasi, dan prosedur pencatatan, praktek yang sehat, serta karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggungjawabnya belum efektif jika dibandingkan dengan teori. Sistem penagihan piutang umumnya sudah efektif hal ini dapat dilihat dari adanya pemisahan fungsi antara piutang, penagihan piutang, penerimaan hasil penagihan, dan pencatatan piutang. Adanya batas maksimum *cash on hand*, dan adanya *rolling collector* dalam melakukan penagihan.

Penelitian ini dilakukan oleh Drs. Ramly Nasution, Ak (2010) memaparkan masalah yang dihadapi oleh PT. Akari Indonesia Cabang Medan, sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan barang-barang elektronik yang bermerk Akari, dalam mengelola penjualan kredit dan penagihan piutang. Hal ini disebabkan lebih dari 96% penjualan yang dilakukan perusahaan ini merupakan penjualan setara kredit. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis ekonomi terhadap piutang agar perusahaan mampu mengetahui efektivitas dari pengelolaan piutangnya, seberapa besar manfaat pemberian piutang, dan

bagaimana pengaruh penjualan secara kredit terhadap peningkatan profitabilitas perusahaan. Evaluasi kebijakan kredit dilakukan dengan menghitung tingkat perputaran piutang dagang dan hari rata-rata pengumpulan piutang, apakah sudah sesuai dengan syarat yang ditetapkan oleh perusahaan itu sendiri, yaitu hari pengumpulan piutang selama 20 hari. Efektifitas pengelolaan piutang dapat diketahui dengan membandingkan tingkat perputaran piutang dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengaruh tingkat perputaran piutang terhadap rentabilitas dihitung dengan menggunakan regresi sederhana. Hasil yang didapat dari perhitungan yang dilakukan, tingkat perputaran piutang PT. Akari Indonesia Cabang Medan tidak begitu fluktuatif hanya pada tahun kelima dari tahun sampel penelitian mengalami penurunan. Hasil perhitungan regresi sederhana menggunakan SPSS menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat perputaran piutang dengan profitabilitas perusahaan (rentabilitas ekonomi) PT. Akari Indonesia Cabang Medan.

Penelitian mengenai pengelolaan piutang usaha lain nya pernah dilakukan oleh Suprptomo dkk (2011) yang meneliti tentang analisis pemeriksaan operasional untuk menilai efisiensi dan efektivitas atas penjualan dan piutang usaha. Penelitian tersebut menggunakan PT. Arya Mandala Dwipa sebagai objek penelitian nya. Penelitian tersebut dilakukan untuk menganalisis apakah pelaksanaan audit operasional pada PT. Arya Mandala Dwipa atas fungsi penjualan dan piutang usaha telah memasuki tahap yang efektif dengan cara membandingkan teori yang ada dengan pelaksanaan dalam perusahaan . Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa auditor internal telah menjalankan tugasnya dengan cukup baik.

Adapun penelitian sebelumnya di lakukan oleh Widiasmara (2014) yang meneliti tentang analisis pengendalian intern piutang usaha untuk meminimalkan piutang tak tertagih (bad debit) pada PT. Wahana Ottomitra Multiartha Tbk cabang madiun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengendalian intern piutang usaha untuk meminimalkan piutang taktertagih (bad debt). Hasil dalam penelitian Secara keseluruhan, prosedur pengendalian intern terhadap piutang usaha pada PT.WOM Finance,Tbk cabang Madiun berjalan cukup efektif.

Hal ini menunjukkan bahwa dengan dilakukannya pengendalian intern terhadap piutang usaha, kualitas booking AR dan kualitas penagihan mengalami perbaikan terus menerus sehingga dapat meminimalkan piutang tak tertagihnya dan berhasil membukukan profit sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan.

Penelitian terdahulu lainnya dilakukan oleh Wuisan (2013), yang meneliti tentang analisis efektivitas pengendalian intern piutang lease pada PT. Finansial Multi Finance tomohon. Penelitian tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah pengendalian intern piutangnya sudah berjalan dengan efektif. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur pengendalian internal berdasarkan kerangka kerja COSO yaitu unsur lingkungan, aktifitas pengendalian, dan pemantauan belum berjalan efektif. Dan unsur penilaian risiko dan informasi dan komunikasi telah berjalan efektif.